

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh laju dari PDRB. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Widianto et al., 2016).

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2016), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi.

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2016 dalam Damara, 2021).

Menurut Djoyohadikusumo (1994:1) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari PDRB per kapitanya. PDRB yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah, ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan PDRB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Berikut ini adalah data PDRB di Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1	2017	7,67
2	2018	7,86
3	2019	6,1
4	2020	4,92
5	2021	16,4

Sumber: Data diolah (www.bi.go.id)

Berdasarkan data dari perwakilan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2020 sebesar 4,92% menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 6,1%.. Penurunan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi covid-19 yang menimbulkan tekanan pada perekonomian seluruh negara. Isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan kesehatan masyarakat sehingga dukungan dalam penyediaan alat-alat kesehatan, riset vaksin dan obat serta pencegahan wabah. Stabilitas keuangan global menjadi kunci menjaga perekonomian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun dalam penelitian ini akan diteliti beberapa faktor diantaranya Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal.

PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Olatunji et al., (2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Hubungan Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020), Suwandika & Yasa (2015) dan Chindy Febry Rori (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Megasari (2020) dan Dewi & Suputra (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain pendapatan asli daerah, faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Belanja modal adalah bagian dari belanja pemerintah yang termasuk dalam APBN atau APBD dengan tujuan kepentingan masyarakat.

Belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli melalui lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmainah (2013), Pambudy & Syairozi (2019) dan Utami & Indrajaya (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) dan Palguno et al., (2020) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tema ini masih terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti kembali tema ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh D. Saraswati (2018) Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara sedangkan penelitian terdahulu yaitu pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan hanya menggunakan 1 variabel X yaitu Dana Alokasi Umum. Perbedaan lainnya yaitu periode pengamatan dalam penelitian ini menggunakan data dan informasi dari tahun 2017-2021 sedangkan penelitian terdahulu yaitu 2007-2012.

Berdasarkan latar belakang diatas serta beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi”** (Studi Pada Kabupaten Kota Se-Provinsi Maluku Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap hubungan antara pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk menganalisis dana perimbangan sebagai variabel pemoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Untuk menganalisis dana perimbangan sebagai variabel pemoderasi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memoderasi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Maluku utara.

1.5 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi.